

# Menganalisis REDD+

## Sejumlah tantangan dan pilihan

Disunting oleh

Arild Angelsen

Disunting bersama oleh

Maria Brockhaus  
William D. Sunderlin  
Louis V. Verchot

Asisten redaksi

Therese Dokken

© 2013 Center for International Forestry Research.  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dicetak di Indonesia  
ISBN: 978-602-1504-01-7

Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. dan Verchot, L.V. (ed.) 2013 Menganalisis REDD+:  
Sejumlah tantangan dan pilihan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Terjemahan dari: Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L.V. (eds) 2012  
Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Penyumbang foto:

Sampul © Cyril Ruoso/Minden Pictures

Bagian: 1. Habtemariam Kassa, 2. Manuel Boissière, 3. Douglas Sheil

Bab: 1 dan 10. Yayan Indriatmoko, 2. Neil Palmer/CIAT, 3. dan 12. Yves Laumonier,

4. Brian Belcher, 5. Tony Cunningham, 6. dan 16. Agung Prasetyo, 7. Michael Padmanaba,

8. Anne M. Larson, 9. Amy Duchelle, 11. Meyrisia Lidwina, 13. Jolien Schure, 14. César Sabogal,

15. Ryan Woo, 17. Edith Abilogo, 18. Ramadian Bachtiar

Desain oleh Tim Multimedia CIFOR  
Kelompok pelayanan informasi

CIFOR  
Jl. CIFOR, Situ Gede  
Bogor Barat 16115  
Indonesia

T +62 (251) 8622-622

F +62 (251) 8622-100

E [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)

[cifor.org](http://cifor.org)  
[ForestsClimateChange.org](http://ForestsClimateChange.org)

Pandangan yang diungkapkan dalam buku ini berasal dari penulis dan bukan merupakan  
pandangan CIFOR, para penyunting, lembaga asal penulis atau penyandang dana maupun para  
peninjau buku.

#### **Center for International Forestry Research**

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui  
penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang.  
CIFOR merupakan salah satu Pusat Penelitian Konsorsium CGIAR. CIFOR berkantor pusat di Bogor,  
Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.



## Pengamanan REDD+ dalam wacana kebijakan nasional dan proyek-proyek percontohan

Pamela Jagger, Kathleen Lawlor, Maria Brockhaus, Maria Fernanda Gebara, Denis Jean Sonwa dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo

- Adopsi dini berbagai standar sosial dan lingkungan di tingkat nasional dan tingkat proyek menunjukkan bahwa para perumus kebijakan, personel proyek, dan investor REDD+ menghargai pengamanan bagi REDD+.
- Untuk memperoleh waktu tunggu tingkat nasional untuk pengamanan REDD+, kedaulatan nasional harus diakui dan kebijakan-kebijakan pengamanan yang simpang siur harus diselaraskan.
- Dialog seputar pengamanan REDD+ perlu bergerak dari diskusi internasional tingkat tinggi ke arah tindakan. Dialog ini mencakup mengenalkan panduan, strategi biaya rendah dan pengembangan kapasitas untuk mendukung interpretasi, implementasi, pemantauan, dan pelaporan pengamanan.

### 17.1 Tantangan utama

Pengamanan REDD+ adalah kebijakan dan langkah yang menangani dampak langsung dan tidak langsung REDD+ bagi masyarakat dan ekosistem. Pengamanan ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dan peluang (Murphy, 2011). Perjanjian Cancun yang ditandatangani dalam Konferensi Para Pihak ke-16 (COP16) UNFCCC mengajak pihak-pihak untuk memajukan,

mendukung, dan melaporkan implementasi tujuh pengamanan sosial dan lingkungan untuk REDD+ (lihat Kotak 17.1). Bentuknya meliputi tata kelola yang transparan; penghormatan pada hak-hak penduduk asli dan masyarakat setempat, serta partisipasi penuh mereka dalam kegiatan-kegiatan REDD+; serta tindakan-tindakan yang mengurangi risiko kehilangan keanekaragaman hayati, kelanggengan dan pengalihan emisi (kebocoran) (UNFCCC 2011a).

Penetapan berbagai standar sosial dan lingkungan yang diakui secara internasional untuk memandu kebijakan dan rancangan proyek REDD+ sangat penting untuk mencapai hasil sosial dan lingkungan yang efektif, efisien, dan setara. Para perumus kebijakan REDD+ menghadapi tantangan besar dalam menetapkan rangkaian kebijakan pengamanan yang dapat diterapkan, dipantau, dan ditegakkan dengan biaya yang relatif murah, serta yang menarik bagi para investor karbon. Di banyak negara REDD+, diskusi seputar pengamanan masih sangat baru dan mewakili sebagian kecil dari

### **Kotak 17.1 Pengamanan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diartikulasikan dalam Perjanjian Cancun**

1. Tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program hutan nasional serta konvensi dan perjanjian internasional yang relevan.
2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional.
3. Penghormatan atas pengetahuan dan hak penduduk asli dan masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, kondisi nasional, dan hukum, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli.
4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan yang terkait, khususnya penduduk asli dan masyarakat setempat, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.
5. Tindakan konsisten dengan pelestarian hutan alam dan keanekaragaman hayati, dengan memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dari keputusan ini tidak digunakan untuk konversi hutan alam, melainkan digunakan untuk merangsang perlindungan dan pelestarian hutan alam dan pelayanan ekosistemnya, serta untuk memperbesar manfaat sosial lainnya.
6. Tindakan untuk mengatasi risiko kemunduran.
7. Tindakan untuk mengurangi pengalihan emisi.

Sumber: UNFCCC (2011a)

dialog kebijakan REDD+ secara keseluruhan. Prakarsa kesiapan REDD+ terutama memfokuskan pada pemantauan karbon, pelaporan dan verifikasi (MRV), dan tidak banyak memberi perhatian pada hal-hal penting lainnya yang terkait dengan pengamanan.

Bab ini membahas kondisi saat ini seputar pengamanan sosial dan lingkungan di tingkat internasional, nasional, dan proyek untuk mitigasi iklim berbasis hutan. Berdasarkan kerangka '4I' yang diuraikan dalam Bab 2, bab ini mengulas analisis pengamanan REDD+ pada berbagai skala. Bagian 17.3, 17.4, dan 17.5 menampilkan analisis tentang dialog internasional saat ini mengenai pengamanan REDD+, perspektif tingkat nasional dan proyek, serta pengalaman dengan pengamanan REDD+. Bagian terakhir mengidentifikasi tantangan dan peluang utama untuk melangkah maju.

## 17.2 Pengamanan dilihat dari lensa ekonomi politik

Kerangka 4I (Bab 2) mengaitkan kelembagaan, kepentingan, gagasan, dan informasi untuk membangun dasar bagi analisis tentang pengamanan REDD+. Kerangka ini menggunakan lensa ekonomi politik, yang dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan pengamanan dirancang, mengapa pengamanan diadopsi, dan peranannya dalam mencapai tujuan REDD+ secara keseluruhan. Pengamanan REDD+ adalah norma-norma atau lembaga-lembaga (North 1990) yang memfokuskan pada pencapaian berbagai standar sosial dan lingkungan minimum, memperhitungkan insentif untuk permintaan dan penawaran kredit karbon yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional yang diakui, serta mencakup diskusi-diskusi seputar peran informasi dan gagasan dalam penetapan kebijakan pengamanan REDD+.

Pengamanan REDD+ yang dirumuskan saat ini merupakan serangkaian norma atau *lembaga* yang memandu harapan seputar hasil sosial dan lingkungan yang terkait pengurangan emisi karbon di negara-negara berkembang. Berbeda dengan peraturan yang memberlakukan sanksi terkait ketidakpatuhan, pengamanan REDD+ menyediakan serangkaian prinsip pemandu yang menggambarkan penawaran untuk, dan permintaan akan, pengurangan emisi. Apakah pengamanan REDD+ akan mencakup bahasa yang menaikannya ke tingkat peraturan masih belum pasti. Sekalipun pengamanan bersifat tidak terikat atau sukarela, para investor memiliki kemampuan untuk memberi sanksi secara informal kepada penghasil karbon dengan menunjukkan preferensi untuk karbon yang dipasok sesuai dengan standar pengamanan.

Implementasi, pemantauan, dan pelaporan seputar pengamanan REDD+ melibatkan biaya transaksi yang signifikan. Karena itu, ketaatan pada kebijakan pengamanan membawa keuntungan nyata yang lebih besar dibandingkan biayanya. Karena ketidakpastian mengenai artikulasi akhir

mengenai pengamanan REDD+ dan sifat serta volume pasar karbon, pemerintah nasional dan pemrakarsa proyek *berkepentingan* menempatkan diri mereka sedemikian rupa sehingga karbon yang mereka pasok setidaknya akan memenuhi pengamanan minimum karena tidak berbahaya. Banyak prakarsa REDD+ juga berupaya untuk memberikan keuntungan sampingan kepada para pengguna sumberdaya lokal. Selain insentif pasar, organisasi pendukung, para donor, dan pemerintah nasional bisa terdorong oleh kewajiban sosial dan lingkungan yang sudah ada untuk menaati pengamanan sosial dan lingkungan atau oleh harapan bahwa REDD+ hanya bisa efektif jika berbagai tujuan sosial dan normanya diindahkan.

Norma juga memengaruhi berbagai harapan dari sisi permintaan. Donor atau pembeli karbon dari sektor swasta mungkin lebih menyukai karbon yang dihasilkan sesuai dengan pengamanan (misalnya, perusahaan yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan atau donor yang mencapai tujuan lingkungan dan pembangunan). Selain itu, kepentingan para investor dalam pengamanan sepertinya digerakkan oleh keinginan untuk mengurangi risiko kerusakan reputasi mereka.

*Gagasan* dan ideologi memainkan peranan penting dalam dukungan untuk pengamanan, berdasarkan pendekatan berbasiskan hak yang menekankan hak asasi penduduk pribumi untuk mengabdikan atau menahan persetujuan sukarela setelah pemberitahuan sebelumnya (*free, prior and informed consent* - FPIC) untuk kegiatan-kegiatan yang memengaruhi tanah yang sudah lama mereka huni dan/atau kelola (Indigenous People's Summit on Climate Change 2009). Sebagian pendukung berpendapat bahwa semua masyarakat yang terkena dampak (bukan hanya kelompok masyarakat pribumi) harus diminta mengabdikan FPIC mereka untuk REDD+.<sup>1</sup> Mereka yang berargumentasi normatif juga mendesak agar REDD+ memberikan manfaat eksplisit (bukan sekedar menghindari bahaya) kepada masyarakat setempat.

Gagasan atau prinsip kedaulatan nasional juga menjadi masalah besar dalam perdebatan seputar penetapan rangkaian pengamanan REDD+ secara internasional. Pemerintah nasional ingin mempertahankan otonomi mereka dalam kebijakan sosial dan lingkungan, yang membuat implementasi pengamanan dengan mandat internasional menjadi menantang.

Implementasi kebijakan pengamanan REDD+ yang efektif adalah tugas yang kompleks. Para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan memiliki kepentingan sendiri untuk memastikan bahwa pengamanan sosial dan lingkungan terawasi, sehingga menyiratkan adanya mekanisme untuk

---

1 Lihat Lawlor dan Huberman (2009) untuk kajian tentang Deklarasi dan Perjanjian PBB tentang Hak Asasi yang paling relevan untuk mengartikulasikan pendekatan berbasis hak kepada REDD+, berdasarkan norma-norma internasional yang sudah mapan ini.

arus *informasi*. Karena itu, pemerintah nasional perlu mengumpulkan dan melaporkan segala informasi tentang indikator-indikator sosial dan lingkungan untuk menunjukkan bahwa pengamanan telah terpenuhi. Negara-negara berkembang telah mengungkapkan rasa frustrasi mereka karena para donor memberlakukan syarat yang rumit dan mahal, yang bervariasi dari lembaga yang satu ke lembaga lainnya, khususnya pada saat dana yang mengalir untuk REDD+ lambat (Kovacevic 2011).

### 17.3 Wacana internasional seputar pengamanan REDD+

Pengamanan REDD+ dari UNFCCC saat ini paling tepat digambarkan sebagai ‘prinsip-prinsip’ yang tidak mengikat, dan bukannya kebijakan atau aturan yang sesungguhnya. Kesepakatan dan panduan yang digalakkan di UNFCCC seputar sistem informasi pengamanan bertujuan mencari keseimbangan antara aturan-aturan yang preskriptif, kedaulatan nasional, dan biaya transaksi. Di satu sisi, tujuannya adalah memberi panduan terperinci kepada negara-negara REDD+ supaya mereka bisa mengidentifikasi dampak negatif dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai sebaik apa pengamanan tengah diimplementasikan. Di sisi lain, diakui bahwa kapasitas negara-negara dalam menerapkan dan melaporkan pengamanan beragam, dan bahwa banyak sistem pengamanan sudah ada, yang seharusnya menjadi dasar pengembangan dan bukannya diduplikasi (UNFCCC 2011c). Para pemangku kepentingan sedang menantikan klarifikasi lebih lanjut dari *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* (SBSTA) tentang definisi ini serta persyaratan MRV untuk pengamanan sosial dan lingkungan dari REDD+. Sementara itu, lembaga-lembaga internasional lainnya, termasuk *Convention on Biological Diversity* (CBD), *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UN DRIP), dan *Universal Declaration on Human Rights*, sedang mengevaluasi apakah kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan mereka selaras dengan kebijakan REDD+ (Hite 2010) (Kotak 17.2).

Di luar UNFCCC, beberapa organisasi internasional dan nirlaba telah mengartikulasikan standar pengamanan untuk kebijakan REDD+ di tingkat nasional. Komitmen ‘tidak membahayakan’ ini tercermin dalam kebijakan perlindungan sosial yang tengah diterapkan oleh *Forest Carbon Partnership Facilities* (FCPF), termasuk *Strategic Environmental and Social Assessment* (SESA) dan *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) (FCPF 2011). FCPF bekerja sama dengan berbagai negara untuk membangun kapasitas kelembagaan mereka untuk merancang dan menerapkan REDD+. Sebagai contoh, FCPF terlibat dalam konsultasi partisipasi dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko bagi penduduk pribumi dan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan (Rapp 2011). Prakarsa Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (REDD+ SES), yang dipimpin oleh *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) dan

### **Kotak 17.2 Mengaitkan Konvensi Mengenai Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) dan pengamanan keanekaragaman hayati oleh REDD+: Pengalaman dari Afrika subSahara**

Upaya untuk menghindari deforestasi dan degradasi hutan seharusnya meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati (Harvey dkk. 2010a; CBD 2011), dan peningkatan kemampuan ekosistem hutan untuk pulih memberi peluang bagi stabilitas karbon hutan (Thompson dkk. 2011). Namun demikian, fokus REDD+ yang kuat pada pemeliharaan cadangan karbon telah menimbulkan kekhawatiran bahwa keanekaragaman hayati bisa terancam jika tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya (CBD 2010). Karena itu diperlukan dialog antara CBD dan UNFCCC untuk mengatasi kekhawatiran ini. COP10 CBD di Nagoya, Jepang, memberi perhatian pada kaitan antara sasaran keanekaragaman hayati dan pengamanan UNFCCC REDD+ dengan mengartikulasikan 20 sasaran keanekaragaman hayati (Sasaran Keanekaragaman Hayati Aichi 5, 7, 11 and 15) yang langsung terkait dengan REDD+.

Setelah dialog global tersebut, sejumlah kegiatan konsultasi dan peningkatan kapasitas sudah berlangsung di tingkat regional. Tahun 2011, sebuah lokakarya gabungan CBD-UNFCCC membahas kaitan antara sasaran keanekaragaman hayati dan REDD+ di Afrika subSahara. Lokakarya ini, yang diadakan di Cape Town, Afrika Selatan, mempertemukan para anggota kunci dari CBD dan UNFCCC dengan mitra-mitra lainnya, termasuk sejumlah perwakilan dari penduduk asli dan masyarakat setempat. Kerangka pengamanan yang sudah ada dalam Program UN-REDD, *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), dan *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) membantu memandu diskusi. Para peserta membahas penerapan kebijakan pengamanan REDD+ tentang keanekaragaman hayati, mengidentifikasi indikator untuk memahami REDD+ dalam lingkup tujuan CBD, dan menyoroti tantangan yang menghadang implementasi pengamanan keanekaragaman hayati di kawasan Afrika. Anggota *Collaborative Partnership on Forests* (CPF)<sup>a</sup> memberikan informasi tentang pengalaman mereka dengan formulasi dan implementasi REDD+ di tingkat nasional dan tingkat proyek.

Kesimpulan dan rekomendasi yang terpenting adalah:

1. Pengamanan keanekaragaman hayati harus ditangani sedini mungkin dalam proses REDD+.
2. Kekurangan dalam proses zonasi lahan harus diatasi.
3. Tidak ada pengamanan khusus untuk mengatasi risiko pembukaan lahan untuk dijadikan hutan di kawasan yang keanekaragaman hayatinya tinggi.
4. Kurangnya perhatian pada kemungkinan untuk memindahkan tekanan deforestasi dan degradasi hutan ke kawasan bernilai karbon rendah dan keanekaragaman hayatinya tinggi.
5. Kurangnya perhatian pada potensi hilangnya pengetahuan ekologi tradisional.



Hasil lokakarya digunakan untuk memberi informasi kepada Pihak-pihak sebelum COP11 CBD, dan untuk memfasilitasi penyesuaian lebih lanjut bagi kebijakan pengamanan keanekaragaman hayati antara CBD dan UNFCCC. Di Afrika subSahara, peningkatan kapasitas masih menjadi tantangan besar dan perlu lebih banyak penelitian untuk memahami kaitan antara REDD+ dan hasil keanekaragaman hayati. Di tingkat regional dan nasional, data tentang simpanan dan aliran karbon serta korelasinya dengan indikator keanekaragaman hayati perlu disediakan. Pengumpulan dan pemrosesan data jenis ini membutuhkan kapasitas dalam negeri untuk mengaitkan hasil karbon dan keanekaragaman hayati, dan untuk menganalisis penyebab dasar dari perimbangan dan sinergi karbon-keanekaragaman hayati.

a CPF adalah perjanjian sukarela informal dari 14 organisasi dan sekretariat internasional dengan program yang substansial tentang hutan.

CARE International, merangkul masyarakat madani bersama sektor swasta dan lembaga-lembaga pemerintah di negara-negara berkembang. Fokus mereka adalah untuk membangun indikator spesifik negara untuk melacak kepatuhan terhadap program-program REDD+ yang dipimpin oleh pemerintah dengan delapan prinsip prakarsa tersebut serta 34 kriteria pendukung (CCBA dan CARE 2010).<sup>2</sup> Prinsip-prinsip ini meliputi komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memberi kontribusi pada tata kelola yang baik (REDD+ SES 2010). Program UN-REDD juga terlibat dalam proses paralel untuk membangun prinsip dan kriteria sosial dan lingkungan yang mencerminkan pengamanan dalam Perjanjian Cancun, dan ini akan berlaku bagi negara-negara yang menerima dukungan finansial untuk REDD+. Program tersebut juga telah mengembangkan prinsip dan kriteria yang mendukung potensi REDD+ untuk membawa manfaat sosial (Program UN-REDD 2011c). Meskipun demikian, prinsip dan kriteria Program UN-REDD tidak membuat rujukan spesifik ke masalah utama seperti penguasaan lahan. Di samping itu, berbeda dengan Bank Dunia, yang mempunyai mekanisme inspeksi formal, Program UN-REDD tidak memiliki mekanisme akuntabilitas.

Ada beberapa standar sertifikasi sukarela untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan di tingkat proyek. Contoh yang paling menonjol adalah *Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standard*, yang sudah diadopsi oleh sekitar 64% dari seluruh proyek karbon hutan (EcoSecurities 2010).<sup>3</sup> Hampir 60% dari kredit karbon hutan yang dijual di pasar sukarela tahun 2010 berasal dari proyek-proyek bersertifikasi CCB (Diaz dkk. 2011). Penyerapan

<sup>2</sup> Versi 2 dari standar ini masih dalam bentuk draft dan sedang menjalani periode komentar publik untuk direvisi. Versi 2 memiliki 7 prinsip dan jumlah kriteria lebih sedikit.

<sup>3</sup> Plan Vivo adalah standar sertifikasi lainnya yang sudah mapan, yang mengharuskan proyek menghasilkan keuntungan bagi iklim dan pencaharian (Plan Vivo 2008).

CCB Standard yang menyebar luas dan sukarela oleh proyek merupakan contoh dari apa yang dirujuk oleh Cashore (2002) sebagai “tata kelola yang digerakkan oleh pasar bukan negara”, yang mencerminkan gagasan dan kepentingan para pelaku dari sisi permintaan (investor, konsumen) maupun sisi penawaran (pemrakarsa proyek) REDD+.

Pengamanan REDD+ mengalami perkembangan di banyak arena politik dan pasar. Pengamanan diterapkan dalam berbagai skala tata kelola, termasuk tingkat proyek dan subnasional, tingkat nasional, dan di ranah kebijakan internasional. Selain perlunya keharmonisan di berbagai skala, ada sejumlah pertanyaan penting yang terkait dengan cara menyelaraskan pengamanan REDD+ dengan perjanjian internasional tentang lingkungan (seperti CBD) dan sejumlah kebijakan sosial dan lingkungan mereka.

## 17.4 Wacana nasional kebijakan pengamanan REDD+

Bagian ini beranjak dari data yang diambil dari Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+ (lihat Lampiran) dan mengeksplorasi dialog media REDD+ nasional serta kapasitas nasional yang difokuskan pada pengamanan REDD+. Pendekatan studi kasus komparatif digunakan untuk menganalisis komunikasi media nasional di empat negara REDD+ dalam upaya untuk memahami substansi dialog kebijakan seputar pengamanan REDD+. Data dari profil negara membantu menjelaskan bagaimana aktivitas, struktur lembaga, dan keputusan kebijakan REDD+ bisa mengarah kepada hasil yang efektif, efisien, dan berkesetaraan. Profil negara juga memberikan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas nasional untuk menerapkan, memantau, dan melaporkan pengamanan.

### 17.4.1 Analisis tentang wacana media

GCS melaksanakan analisis wacana media secara menyeluruh di beberapa negara, termasuk Brasil, Kamerun, Indonesia, dan Vietnam,<sup>4</sup> untuk memperhitungkan liputan koran seputar perumusan dan implementasi kebijakan REDD+.<sup>5</sup> Para peneliti melakukan analisis liputan media cetak nasional dan mewawancarai sejumlah wartawan.<sup>6</sup> Media dipandang sebagai jendela ke diskusi kebijakan informal dan formal (Boykoff 2008). Analisis yang dilakukan di sini mengidentifikasi rujukan-rujukan spesifik ke elemen-elemen

4 Media cetak di Vietnam dikendalikan oleh pemerintah pusat.

5 Meskipun Peru dan Tanzania termasuk di dalam Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+, analisis media untuk negara-negara ini belum tersedia.

6 Data terutama berasal dari tahun 2005–2009 tetapi data yang dimutakhirkan sampai 2011 untuk Brasil dan Indonesia digunakan untuk melakukan analisis pendahuluan dan mengidentifikasi tren. Data diambil dari politik REDD+ dalam studi kasus media (Cronin and Santoso 2010; Kengoum 2011; May dkk. 2011a; Pham 2011).

terpenting dari kebijakan pengamanan REDD+, termasuk tata kelola dan pengamanan, kesejahteraan sosial, keanekaragaman hayati, dan MRV.

Analisis tersebut mengungkapkan bahwa masalah-masalah utama yang terkait dengan tata kelola dan pengamanan tidak diliput dengan baik oleh media nasional. Namun yang paling memprihatinkan adalah korupsi di lembaga-lembaga kehutanan nasional dan kemungkinan dampak bertambahnya aliran dana dari REDD+ bagi sejumlah lembaga yang sudah ada, khususnya dalam membuka peluang baru untuk mencari rente di kalangan pejabat publik. Media di Indonesia menyuarakan keprihatinan tentang kontradiksi antara kebijakan umum REDD+ dan kebijakan di sektor lain, tapi tidak ada rujukan spesifik yang dibuat untuk kebijakan pengamanan. Ada liputan yang signifikan seputar isu-isu terkait hak masyarakat asli dan hak asasi di Brasil dan Indonesia, tapi tidak demikian halnya di Kamerun dan Vietnam. Hak kepemilikan dan penguasaan lahan dan karbon juga mendapat perhatian dan termasuk dalam diskusi tentang hilangnya akses ke hutan, serta keprihatinan seputar distribusi keuntungan di bawah REDD+. Secara keseluruhan, terbatasnya liputan seputar hak masyarakat asli, hak asasi, dan hak kepemilikan menunjukkan sedikitnya perhatian pada masalah pengamanan dalam dialog kebijakan nasional.

Keanekaragaman hayati secara konsisten dikaitkan dengan pelestarian, yang diidentifikasi sebagai pilihan terbaik untuk mempertahankan hutan asli di Brasil dan Kamerun. Media Vietnam menampilkan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai potensi keuntungan tambahan dari REDD+. Di negara-negara dengan sistem MRV yang relatif maju, media membahas kebocoran dan kelestarian sebagai masalah penting dalam mencapai REDD+, tapi masalah ini tidak diliput di negara-negara dengan kapasitas MRV yang rendah. Kurangnya rujukan eksplisit untuk 'pengamanan' memang sudah diduga; istilah ini memang belum digunakan secara luas oleh media di banyak negara sebelum COP Cancun tahun 2010. Meskipun demikian, media Brasil membahas pengamanan secara eksplisit dalam pelaporan mereka seputar hasil negosiasi internasional yang tengah berlangsung tentang REDD+.

Media di Brasil dan Indonesia tampaknya paling sadar akan pengamanan. Meskipun mereka tidak meliput semua aspek, ada diskusi eksplisit tentang masalah-masalah utama, termasuk lembaga kehutanan yang korup, kedaulatan, hak-hak masyarakat asli, kebocoran, dan kelestarian. Kenyataan bahwa Brasil telah menunjukkan kepemimpinan yang mantap dalam menetapkan kebijakan pengamanan REDD+ (lihat Kotak 17.3) dan bahwa Indonesia sudah sampai pada proses kebijakan tingkat lanjut membantu menjelaskan temuan ini.

### Kotak 17.3 Kebijakan pengamanan REDD+ nasional di Brasil

Brasil adalah pemimpin dunia dalam hal pengembangan kebijakan nasional untuk pengamanan sosial dan lingkungan. Prosesnya dimulai tahun 2009 saat beberapa organisasi masyarakat madani mulai mengembangkan prinsip dan kriteria sosial dan lingkungan untuk program dan proyek REDD+. Prakarsa ini bertujuan untuk: i) memperkuat tata kelola hutan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh penduduk asli dan masyarakat setempat; ii) mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan; iii) mengkoordinasikan tindakan di kalangan pemangku kepentingan; iv) meningkatkan transparansi informasi; dan v) membangkitkan penghormatan pada, serta kesadaran dan pengakuan akan hak-hak penduduk asli dan masyarakat setempat atas wilayah, tanah, sumberdaya alam, dan mata pencaharian serta budaya tradisional mereka (Gomes dkk. 2010).

*The Institute for Agriculture and Forest Management Certification (IMAFLORA)* memimpin proses konsultasi, yang terbuka bagi semua pemangku kepentingan utama. Empat lokakarya regional memastikan penduduk asli, masyarakat setempat, dan pemilik tanah skala kecil terakup.<sup>a</sup> Para pemangku kepentingan ini diuntungkan oleh penambahan kapasitas sebelum lokakarya untuk memastikan mereka benar-benar memahami dokumen pengamanan dan implikasinya. Tim tersebut juga mengundang kelompok-kelompok dari sektor swasta untuk menyumbangkan pendapat mereka. Menjelang Mei 2010, dokumen akhir yang menggambarkan prinsip dan kriteria Brasil untuk REDD+ sudah siap dan direkomendasikan kepada para perumus kebijakan di tingkat nasional dan negara.<sup>b</sup> Prinsip dan kriteria yang dicantumkan di dalam dokumen itu menjadi dasar bagi pengamanan nasional Brasil dan strategi REDD+ sesuai permintaan dalam Perjanjian Cancun.

Tahun 2011, Kementerian Lingkungan menyelenggarakan dua pertemuan untuk menginformasikan perkembangan strategi nasional REDD+ Brasil (MMA 2011). Para peserta diambil dari berbagai sektor masyarakat madani dan pemerintahan. Mereka bekerja bersama untuk mengevaluasi apakah usulan kerangka pengamanan akan mencakup ancaman utama bagi keanekaragaman hayati dan penduduk asli/masyarakat setempat, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam penerapannya.

Dalam pertemuan kedua, para peserta menelaah berbagai pendekatan dan definisi pengamanan. Sesudah pembahasan ini, Kementerian Lingkungan mengemukakan sebuah daftar pengamanan untuk dipertimbangkan dalam pengembangan strategi nasional REDD+ Brasil.

1. Peraturan hukum
2. Jaminan hak
3. Keberlanjutan ekonomi dan pengurangan kemiskinan
4. Pelestarian dan pemulihan keanekaragaman hayati

5. Tata kelola
6. Pembagian keuntungan
7. Pemantauan dan transparansi
8. Kepastian dan kebocoran
9. Partisipasi.

Pertemuan-pertemuan tersebut sukses mendorong berlangsungnya proses terbuka ke arah pengembangan strategi pengamanan nasional. Mereka juga menyoroti persyaratan utama untuk keberhasilan implementasi; i) tata kelola dan partisipasi yang baik, yang mencakup kepastian kemauan politik, dialog, dan koordinasi; ii) informasi dan peningkatan kapasitas; iii) partisipasi pemangku kepentingan, pemantauan dan penyelesaian konflik; iv) pembagian keuntungan; dan v) koordinasi kebijakan-kebijakan sektoral, misalnya, peraturan hutan (MMA 2011). Kendala utama dalam implementasi yang efektif dari kebijakan pengamanan di Brazil adalah kurangnya data dan kriteria yang jelas yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan.

Meskipun perhatiannya terpusat pada masalah-masalah pengamanan, Brasil juga mengambil posisi 'menghadang' di arena internasional sesudah COP17 di Durban tahun 2011. Selama pertemuan SBSTA, Brasil menentang pelaporan internasional mengenai cara menangani dan menyikapi pengamanan REDD+. Sebagian pihak menganggap posisi ini egois, karena menghambat kemajuan negosiasi REDD+ dan bisa merusak kredibilitas REDD+ di mata investor internasional. Setiap tindakan yang menghambat pendanaan akan membahayakan negara-negara yang tidak memiliki strategi pengamanan yang memadai.

a Lokakarya ini menghasilkan 379 komentar seputar 8 prinsip dan 27 kriteria. Secara keseluruhan, proses konsultasi menghasilkan 559 pertimbangan, komentar, dan saran, yang semuanya tersedia *online*.

b Untuk dokumen lengkap lihat: <http://www.observatoriodoredd.org.br/site/pdf/DevelopingREDD.pdf>

## 17.4.2 Kapasitas nasional untuk implementasi pengamanan REDD+

Kalau pemerintah mau terlibat dalam kebijakan pengamanan, mereka harus mampu menilai hasil sosial dan lingkungan di tingkat nasional.<sup>7</sup> Selain itu, saat membuat komitmen tingkat nasional untuk pengamanan internasional, negara harus memberikan indikator perubahan yang setara pada bidang-bidang utama, sebagaimana diartikulasikan oleh UNFCCC. Saat ini, sebagian besar negara REDD+ mengalami kesulitan dengan persyaratan minimum:

7 Sumber-sumber untuk bagian ini termasuk Dkamela (2011), May dkk. (2011b), DAR dan CIFOR (2012), Indrarto dkk. (2012), REPOA and CIFOR (2012).

memperlihatkan bahwa deforestasi dan degradasi hutan berkurang. Kedua pengamanan ini baru bisa dipantau dengan baik bila mereka menambah kapasitas untuk MRV, yang mencakup masalah kebocoran dan kelestarian. Namun demikian, tantangan untuk melakukan perhitungan tingkat nasional tentang dampak sosial dan manfaat tambahan keanekaragaman hayati tidak banyak mendapat perhatian di sebagian besar negara REDD+. Data yang dikumpulkan oleh GCS memberikan profil untuk lima negara REDD+ (Brasil, Kamerun, Indonesia, Tanzania, dan Vietnam), yang meliputi perhitungan tingkat kapasitas mereka untuk implementasi, pemantauan, dan pelaporan seputar bidang-bidang tematik utama pengamanan REDD+ (kesejahteraan sosial, keanekaragaman hayati, kelestarian, dan kebocoran).

Negara-negara yang dikaji sepertinya memiliki kapasitas rendah untuk memantau dampak sosial dan keanekaragaman hayati. Kecuali Tanzania, perjanjian pembagian keuntungan masih belum diartikulasikan, sehingga sulit untuk mengevaluasi hasil kesejahteraan yang terkait dengan REDD+. Di samping itu, sebagian besar negara mengalami kesulitan menafsirkan FPIC. Di Indonesia, FPIC adalah suatu prakondisi untuk keterlibatan masyarakat dalam REDD+; namun, FPIC perlu didefinisikan dulu untuk menilai apakah FPIC sudah tercapai atau belum. Sebagai catatan positif, ada bukti partisipasi aktif dalam kebijakan REDD+ di tingkat nasional. Brasil, Indonesia, dan Tanzania telah mencapai keterlibatan yang berarti dari pemangku kepentingan dalam diskusi kebijakan terkait keuntungan bersama di bidang sosial dan keanekaragaman hayati, meskipun diskusi seputar pemantauan dampak keanekaragaman hayati dari REDD+ masih dalam tahap perencanaan. Sebagai contoh, Strategi REDD+ Indonesia menghendaki pembangunan sistem MRV nonkarbon yang mencakup keanekaragaman hayati.

Brasil, Indonesia, dan Tanzania telah mengembangkan kapasitas untuk memantau perubahan penggunaan lahan, dan mereka berada pada tahap-tahap yang berbeda terkait penetapan tingkat rujukan dan pemberlakuan sistem nasional untuk mengidentifikasi kebocoran. Negara-negara ini adalah di antara yang paling maju dalam urusan MRV karbon dan sudah siap memantau dan melaporkan kebocoran dan kelestarian. Namun demikian, mereka masih menghadapi kendala yang harus diatasi, yang meliputi keputusan tentang frekuensi pemantauan, bagaimana mendapatkan informasi *real-time* tentang perubahan penggunaan lahan, dan menggunakan data yang spesifik lokasi untuk mempersempit dan mengonfirmasi kebocoran dan kepastian. Negara-negara lain (misalnya, Kamerun dan Peru) masih tertinggal dan belum mampu memantau kebocoran dan kepastian. Di samping itu, semua laporan negara mencatat adanya ambiguitas terkait kepemilikan. Kalau hak kepemilikan atas tanah, pepohonan, dan karbon tidak jelas, pengurangan deforestasi hutan secara permanen tidak mungkin dicapai (lihat Bab 6, 8, dan 9).

Membangun kapasitas untuk menerapkan, memantau, dan menegakkan pengamanan REDD+ adalah masalah yang sangat penting, dan negara-negara dengan infrastruktur REDD+ paling maju bisa menangani kebocoran dan kepastian. Meskipun demikian, sebagian besar masih belum bisa memantau kebocoran sosial atau mengevaluasi batasan dan integritas proses perizinan dan keikutsertaan (lihat Bab 6).

## 17.5 Belajar dari pengalaman proyek

Meskipun masih pada tahap awal, banyak proyek REDD+ sudah menerapkan tujuh pengamanan UNFCCC. Bagian ini mengulas motivasi dan pengalaman proyek dengan pengamanan kesejahteraan masyarakat setempat dan keanekaragaman hayati. Tim GCS mewawancarai personel proyek untuk mengetahui sejauh mana proyek mereka memenuhi sasaran-sasaran berikut: i) menghormati hak penduduk asli dan masyarakat setempat (pengamanan UNFCCC 3); ii) memfasilitasi partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan setempat (pengamanan UNFCCC 4); dan iii) memastikan konsistensi dengan tujuan-tujuan pelestarian dan keanekaragaman hayati (pengamanan UNFCCC 5). Data dikumpulkan dari 19 proyek di Brasil (4), Kamerun (2), Indonesia (6), Tanzania (6), dan Vietnam (1). Semuanya, kecuali empat proyek, melaporkan bahwa mereka sudah punya rencana untuk mendapatkan sertifikasi CCB.

### 17.5.1 Mendapatkan persetujuan sukarela setelah pemberitahuan sebelumnya (FPIC)

Meskipun FPIC tidak muncul dalam pengamanan UNFCCC, secara implisit hal ini dirujuk dalam pengamanan nomor 3: ajakan kepada para pihak untuk menghormati hak-hak penduduk asli, sesuai kerangka UN DRIP. Berdasarkan keputusan ini, negara-negara anggota harus mendapatkan FPIC untuk kegiatan-kegiatan yang memengaruhi lahan hak milik adat, yang dihuni dan/atau digunakan oleh penduduk asli. Standar CCB mengharuskan proyek mendapatkan FPIC dari seluruh masyarakat setempat (asli atau bukan). Saat ditanya seputar perolehan FPIC, kebanyakan tim proyek sudah mendapatkan atau merencanakan untuk mendapatkan FPIC (50 dari 59 desa dalam sampel GCS). Sembilan proyek memberikan informasi seputar jenis persetujuan yang diperoleh (atau direncanakan), sebagian besar mendapat persetujuan melalui perjanjian lisan dan hanya dua secara tertulis. Lima dari sembilan proyek berkonsultasi dengan subkelompok sebagai bagian dari proses FPIC.

Skala proyek sepertinya memengaruhi besarnya perhatian pada FPIC, khususnya definisi orang atau kelompok yang memberikan persetujuan serta penyebaran informasi tentang suatu proyek. Tim untuk proyek yang lebih besar, yang sebagian di antaranya meliputi seluruh provinsi atau beberapa kabupaten atau kota administratif, berusaha mendapatkan izin dari pemerintah di tingkat

negara dan kabupaten, termasuk dari lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor industri. Proyek berskala lebih kecil (kelurahan atau kota) biasanya meminta persetujuan dari lembaga di tingkat desa atau dari masyarakat sendiri melalui rapat desa. Satu proyek menyewa pengacara untuk masyarakat dan mendorong mereka untuk mencari nasihat independen sebelum bertindak. Proyek yang lebih besar cenderung memberitahu masyarakat melalui lokakarya dengan para pemangku kepentingan, sementara proyek yang lebih kecil menggunakan media lokal (terutama radio), serta penyebaran poster dan selebaran serta sesi tanya jawab.

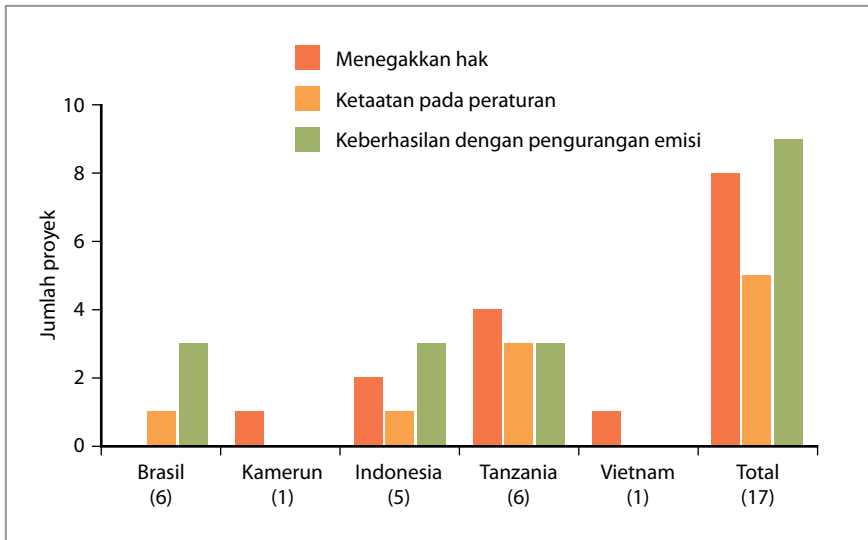
Motivasi untuk menjalankan FPIC dibagi menjadi tiga kategori: i) menegakkan hak asasi manusia; ii) mematuhi aturan atau lembaga formal seperti standar sukarela (misalnya, CCB) atau hukum nasional (misalnya, UU Tanah Tanzania); dan iii) mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 17.1, pencapaian tujuan karbon hutan (keberhasilan) dan penegakan hak asasi manusia adalah motivasi utama. Sejalan dengan penekanan pada hak (gagasan, lembaga formal) dan keefektifan (kepentingan), beberapa perwakilan proyek menyatakan bahwa FPIC tidak pernah bisa sepenuhnya diperoleh karena FPIC adalah “sebuah proses dan bukan peristiwa” dan “menurut definisinya persetujuan ini tidak pernah berakhir”.

Persyaratan pengungkapan informasi dan biaya transaksi terkait FPIC bisa menimbulkan masalah. Staf proyek mengalami kesulitan untuk mendapatkan orang dalam jumlah yang memadai untuk menghadiri rapat penyuluhan. Mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumberdaya keuangan dan waktu untuk proses partisipasi, terutama untuk memastikan bahwa informasi proyek sampai ke tiap rumah tangga secara tepat waktu. Seorang perwakilan proyek mencatat bahwa, meskipun sudah menandatangani perjanjian dan membangun kepercayaan yang cukup besar, “FPIC adalah sebuah mimpi yang mustahil” dan “sesungguhnya sangat sulit dipenuhi”. REDD+ yang baru lahir ini menjadi tantangan yang lebih besar karena FPIC meminta orang untuk menyetujui sesuatu yang masih terus berubah dan masih menyimpan sejumlah pertanyaan terkait kompensasi atas perubahan pemanfaatan lahan.

### **17.5.2 Keterlibatan masyarakat dalam rancangan proyek**

Sebagian besar proyek (16 dari 18) melibatkan masyarakat setempat dalam rancangan dan implementasinya. Misalnya, dalam mengidentifikasi pemicu deforestasi dan degradasi hutan, pengembangan skenario dasar, dan pengambilan keputusan tentang intervensi yang tepat serta kegiatan mata pencaharian alternatif. Di salah satu proyek, masyarakat setempat membantu penyusunan kata-kata dalam kontrak. Pertemuan pemangku kepentingan





**Gambar 17.1 Motivasi proyek untuk mendapatkan FPIC: Hak, peraturan, dan keberhasilan**

Catatan: Tidak ada data untuk satu proyek di Kamerun dan satu proyek di Indonesia. Jumlah proyek di dalam tanda kurung.

yang diselenggarakan oleh proyek Acre di Brasil menyebabkan rancangan proyek dibongkar total, proyek yang spesifik lokasi diganti dengan program yang lebih menyeluruh, mencakup negara bagian dan mengubah penekanan dari pembayaran menjadi insentif untuk berbagai jasa lingkungan. Tantangan utamanya adalah: mengidentifikasi para pemimpin yang benar-benar mewakili masyarakat/sector; memastikan masyarakat setempat punya suara yang berarti dalam pengambilan keputusan; dan mendapatkan sumberdaya finansial yang diperlukan untuk partisipasi penuh, terutama dalam upaya menjangkau penduduk yang nomaden.

### 17.5.3 Tujuan keanekaragaman hayati dan pelestarian alam

Sebagian dari data survei menjelaskan bagaimana proyek-proyek REDD+ menangani masalah-masalah terkait keanekaragaman hayati dan pelestarian alam. Sepuluh proyek – Brasil (1), Kamerun (2), Indonesia (2), Tanzania (4), dan Vietnam (1) – melaporkan bahwa lokasi mereka dipilih untuk mempertimbangkan masalah-masalah keanekaragaman hayati dan pelestarian alam. Meskipun demikian, hanya lima – Indonesia (1), Tanzania (3), dan Vietnam (1) – merencanakan untuk mencapai sasaran pengelolaan hutan dengan sasaran pelestarian atau regenerasi spesies tertentu.

## 17.6 Sejumlah tantangan dan pilihan untuk pengamanan REDD+

Analisis ini menyoroti beberapa tantangan dan pilihan untuk keberhasilan implementasi pengamanan REDD+. Masyarakat kebijakan hutan global saat ini tengah menantikan penyelesaian pengamanan REDD+ oleh UNFCCC dan standar lainnya yang diakui secara internasional serta panduan yang terkait dengan pemantauan dan pelaporan kemajuan ke arah pencapaiannya.

### 17.6.1 Tantangan

Analisis kami menunjukkan sejumlah tantangan bagi pengamanan REDD+ saat diformalkan dan diintegrasikan dengan kebijakan REDD+ nasional.

**Penyelarasan horizontal:** Kebijakan pengamanan REDD+ harus diselaraskan dengan kebijakan pengamanan internasional lainnya (misalnya, CBD). Namun demikian, proses penyelarasan pengamanan lintas sektor dan ranah kebijakan menambah biaya transaksi untuk pengembangan dan implementasinya.

**Penyelarasan vertikal:** Ada tumpang tindih antara pengamanan dan standar REDD+ di tingkat internasional, nasional, dan proyek. Hal ini perlu dieksplorasi dengan cara yang produktif sehingga meminimalkan biaya transaksi dan menggunakan data dan indikator yang sudah ada seefektif mungkin.

**Kedaulatan:** Memutuskan sejauh mana suatu negara harus memiliki otonomi atas kebijakan sosial dan lingkungan.

**Kapasitas:** Ada heterogenitas yang cukup tinggi dalam hal kapasitas untuk memantau dan melaporkan pengamanan pada skala nasional. Meskipun pengembangan kapasitas untuk memantau dan melaporkan kebocoran dan kepastian menunjukkan kemajuan, sistem pemantauan tingkat nasional yang menunjukkan bagaimana REDD+ memengaruhi pengamanan tata kelola, kesejahteraan, dan keanekaragaman hayati masih tertinggal.

**Biaya:** Biaya tinggi diperlukan untuk menerapkan pengamanan sosial dan keanekaragaman hayati, termasuk FPIC, membina keikutsertaan, dan memantau keanekaragaman hayati. Karena itu kalau terlalu tinggi, biayanya bisa menjadikan REDD+ tidak layak lagi.

**Masalah yang diabaikan:** Beberapa masalah besar – terutama hak lahan, pepohonan, dan karbon (Bab 8) – tidak ditangani dengan memadai. Kurangnya perhatian pada kebijakan pengamanan internasional bisa berimplikasi pada hasil sosial dan lingkungan. Diperlukan kejelasan, khususnya mengenai apa yang sedang diamankan (hutan, pepohonan, karbon, mata pencaharian, atau keanekaragaman hayati) dan untuk siapa.

## 17.6.2 Pilihan

Terlepas dari semua tantangan besar tersebut, ada peluang bagi keberhasilan pengamanan REDD+. Dengan menggunakan kerangka 4I, jalur-jalur pendekatan berikut ini diusulkan untuk langkah kebijakan.

**Membina pengamanan sebagai norma yang universal:** Sekalipun pemantauan dan pelaporan pengamanan internasional dan nasional bersifat sukarela, sebagian besar negara tidak akan menyimpang terlalu jauh dari normal bagaimana pun kondisi nasional mereka. Jika pasar karbon sukarela lepas landas, norma ini akan semakin dijunjung tinggi.

**Menyeimbangkan kepentingan berbagai pelaku:** Pelaksana proyek dan pemerintah nasional ingin menghasilkan karbon yang tidak membahayakan atau yang membawa manfaat sosial dan lingkungan. Para investor yang melindungi reputasi mereka, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kesejahteraan atau pelestarian, mendukung kebijakan pengamanan. Kedua kelompok ini ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Sinergi yang nyata ini harus dipantau dalam waktu dekat dan difasilitasi untuk mempertahankan insentif yang mendukung pengamanan sosial dan lingkungan.

**Dari gagasan normatif ke praktik kebijakan:** Masalah pengamanan dan implementasinya mendapat perhatian di sejumlah negara REDD+, di mana berbagai forum diskusi membantu menyampaikan informasi tentang proses kebijakan. Wacana tingkat nasional tentang pengamanan harus didorong dan didukung. Brasil telah mencapai kemajuan besar, tapi pengalaman ini masih belum berpengaruh di arena global.

**Meningkatkan informasi:** Masih banyak yang harus dipelajari dari pengalaman proyek, dialog tingkat nasional, dan sumberdaya alam serta prakarsa lainnya terkait iklim. Namun informasi tentang cara mengembangkan, menerapkan, memantau, dan melaporkan pengamanan perlu dibagikan. Standar REDD+ sukarela pada skala nasional dan skala proyek tengah diadopsi secara luas. Standar ini juga menetapkan etos untuk manfaat bersama dalam hal kesejahteraan dan keanekaragaman hayati serta persyaratan untuk mengumpulkan informasi seputar status pengamanan di seluruh siklus proyek.

